

Berita : Kades Jangan Gelap Mata Gunakan DD
Entitas / Cakupan : Kabupaten Sumedang
Sumber / Hal : Galamedia/Hal. 9
Edisi : Kamis, 7 Desember 2017

Kades Jangan Gelap Mata Gunakan DD

SUMEDANG, (GM).-

Kapolres Sumedang, AKBP Hari Brata mengingatkan para kepala desa (kades) agar jangan gelap mata dalam menggunakan bantuan keuangan Dana Desa (DD). Ditegaskan Kapolres, menggunakan DD harus hati-hati sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Meski begitu, Kapolres juga meminta para kades untuk tidak bingung dalam penggunaan dana tersebut.

Hal itu disampaikan Kapolres saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polres Sumedang dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang, bertempat di Aula Asia Plaza, Sumedang, Rabu (6/12). MoU tersebut, dalam rangka penanganan segala permasalahan penggunaan DD.

Tampak hadir, selain Bupati Sumedang, H. Eka Setiawan dan Dandim 0610 Sumedang, Letkol Arm. I Made Mertha Yasa, acara tersebut turut dihadiri pula 780 undangan yang terdiri dari para camat, danramil, kapolsek, kepala desa, seluruh anggota bhabinkamtibmas dan babinsa.

Menurut Hari, dengan besarnya anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh seluruh desa yang ada di lingkungan Pemkab Sumedang, hendaknya jangan sampai para kades menjadi kebingungan dalam pemanfaatan dana tersebut. Apalagi bila sampai gelap mata, yang dapat menggiringnya pada wilayah pidana.

Menyikapi hal itu, Polres Sumedang, membuka pintu bagi para kades, yang hendak melakukan konsul-



ADE HADELI'GM

BUPATI Sumedang H. Eka Setiawan menandatangani nota kesepahaman (MoU) penanganan permasalahan penggunaan dana desa, di Aula Asia Plaza, Rabu (6/12).

tasi, terkait penggunaan dana desa. "Bagi kades yang masih ragu untuk memanfaatkan Dana Desa, maka kami memberikan ruang bagi mereka, untuk beronsultasi. Sehingga nantinya penggunaan DD itu, bisa terhindar dari tindakan penyelewengan," tandasnya.

Fungsi pencegahan

Ditegaskan Hari, MoU yang dilaksanakan bersama Pemkab Sumedang tersebut, juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan pusat. Karena MoU tersebut sebelumnya terlebih dahulu dilakukan di tingkat pusat, yakni MoU yang dilakukan antara Menteri Desa, Kapolri dan Menteri Dalam Negeri, yaitu tentang Penanganan Permasalahan Dana Desa. MoU inilah yang ke-

mudahan dijadikan dasar bagi Polres Sumedang untuk melaksanakan fungsi pencegahan adanya penyelewengan Dana Desa.

"Dengan demikian, mulai tahun 2018 kita akan mulai menggiring anggaran ini (DD) agar jangan sampai keluar dari jalurnya. Terlebih lagi berdasarkan informasi, tahun depan (2018) DD yang akan diterima tiap desa nominalnya bertambah sebesar Rp 1 miliar, sehingga masing-masing desa akan menerima sekitar Rp 2,5 miliar," ungkapnya.

Masih menurut Hari, atas arahan Kapolri, para bhabinkamtibmas pun harus mampu memberikan penyuluhan terkait penggunaan dana desa. **(B.108)****